



IRUD LAB'S

TOC REVIEW

25/07/25

Kekerasan Seksual terhadap Etnis Rohingya: Mengungkap Faktor Psikologis di Balik Kejahatan Internasional

Oleh:

Adinda Maharani Arefan Putri

Kekerasan Seksual dalam Krisis Kemanusiaan Rohingya

Etnis Rohingya merupakan kelompok Muslim di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang telah lama mengalami diskriminasi sistematis. Pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh karena kemiripan dengan etnis Bengali, sehingga tidak diakui sebagai warga negara. Kebijakan seperti Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 hanya mengakui etnis yang bermukim sebelum kolonialisme Inggris pada 1824, mengecualikan Rohingya dan menjadikan mereka tanpa kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar memandang Rohingya sebagai ancaman keamanan, yang menjadi alasan tindakan represif. Operasi militer pada 1978 memicu eksodus besar ke Bangladesh. Ketegangan meningkat pada 2016 setelah serangan kelompok ARSA terhadap pos polisi, direspons militer dengan kekerasan sistematis. Puncaknya, operasi militer pada Agustus 2017 menyebabkan ribuan korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi, memperparah penderitaan Rohingya sebagai kelompok terpinggirkan dan tidak diakui hingga kini.

Diskriminasi yang dialami Rohingya di Myanmar tidak hanya mencabut hak kewarganegaraan mereka, tetapi juga memaksa banyak di antara mereka melarikan diri ke negara lain demi mencari perlindungan. Sayangnya, di tempat pelarian maupun dalam kehidupan sehari-hari, mereka tetap menghadapi berbagai kerentanan, termasuk kekerasan seksual dan pernikahan paksa, yang semakin memperdalam penderitaan kelompok ini. Di Myanmar, laporan dari BBC Indonesia mengungkap bahwa tentara Myanmar diduga menggunakan kekerasan seksual secara sistematis sebagai alat teror untuk menumpas komunitas Rohingya. Utusan Khusus PBB, Pramila Patten, menyebut bahwa bentuk kekerasan ini meliputi pemerkosaan beramai-ramai, pemaksaan untuk telanjang di depan umum, dan perbudakan seksual. Kekejaman tersebut seringkali menyebabkan trauma berat hingga kematian bagi para korban. Tindakan ini menunjukkan pola pelecehan yang disengaja dan terstruktur, menjadikan kekerasan seksual sebagai bagian dari strategi militer untuk mengintimidasi dan menghancurkan komunitas Rohingya.

Namun, penderitaan Rohingya tidak berhenti di Myanmar. Dalam perjalanan mereka mencari perlindungan di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, para pengungsi tetap menghadapi berbagai bentuk kerentanan, termasuk eksploitasi seksual dan pernikahan paksa. Perempuan dan anak-anak Rohingya, khususnya gadis remaja, menjadi kelompok yang paling rentan. Mereka sering kali menjadi korban kekerasan seksual atau dipaksa menikah di bawah tekanan ekonomi maupun sosial. Ketidakadilan ini diperparah oleh status mereka sebagai



IRUD LAB'S

TOC REVIEW

25/07/25

kelompok tanpa kewarganegaraan, yang membuat mereka sulit mendapatkan perlindungan hukum di negara-negara tempat mereka berlindung. Kekerasan seksual terhadap Rohingya memiliki dimensi politik dan sosial yang mendalam. Dalam konteks Myanmar, kekerasan ini tidak hanya merupakan serangan fisik, tetapi juga alat untuk memperkuat dominasi mayoritas dan menekan keberadaan minoritas. Diskriminasi terhadap Rohingya, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual, bertujuan menghapuskan identitas komunitas ini, baik melalui pengusiran maupun penghilangan generasi.

Dengan demikian, kekerasan seksual terhadap etnis Rohingya merupakan masalah yang melintasi batas negara, terjadi dalam berbagai tahap penderitaan mereka, baik di tanah asal maupun di tempat pengungsian. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari komunitas internasional, tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada para korban, tetapi juga untuk memastikan keadilan bagi mereka melalui proses hukum internasional yang komprehensif.

Analisis dalam Teori Psikologi Kejahatan

Salah satu teori yang relevan untuk menganalisis kasus kekerasan seksual dalam krisis kemanusiaan Rohingya ini adalah *rational choice*. Teori *rational choice* beranggapan bahwa individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu tindakan, termasuk kekerasan, akan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, yakni mereka mengevaluasi kemungkinan hasil dari tindakan tersebut (keuntungan atau kerugian) dan memilih tindakan yang dianggap memberikan hasil terbaik bagi mereka. Dalam konteks Rohingya, pihak yang melakukan kekerasan seperti militer Myanmar mungkin melihat pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai cara yang efektif untuk mencapai tujuan politik atau sosial mereka, seperti melemahkan dan menghancurkan komunitas Rohingya. Mereka mungkin mempertimbangkan bahwa kekerasan seksual adalah strategi untuk menakut-nakuti Rohingya, memperburuk kondisi mereka, dan mengusir mereka dari wilayah yang mereka huni, dengan melihat ini sebagai pilihan yang paling rasional untuk memastikan dominasi politik atau etnis. Selain itu, kebebasan dari hukuman juga menjadi faktor penting dalam penerapan teori ini. Banyak pihak yang terlibat dalam kekerasan seksual terhadap Rohingya mungkin merasa bahwa mereka tidak akan dihukum, mengingat lemahnya penegakan hukum internasional dan ketidakmampuan sistem hukum di Myanmar untuk menuntut mereka secara adil.

Teori lain yang dapat mengidentifikasi faktor yang membuat pelaku melakukan kekerasan seksual pada etnis Rohingya adalah *reasoned action*. Dalam menganalisis kejahatan, *teori reasoned action* dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Maka, teori *reasoned action* dapat digunakan untuk menganalisis kekerasan seksual terhadap Rohingya dengan memahami bahwa keputusan pelaku seperti anggota militer Myanmar, didasarkan pada dua faktor utama, yakni :



IRUD LAB'S

TOC REVIEW

25/07/25

- Sikap terhadap tindakan tersebut
- Norma sosial yang mendasarinya

Dalam hal ini, pelaku mungkin memiliki sikap positif terhadap kekerasan seksual karena melihatnya sebagai alat untuk menekan atau menghancurkan komunitas Rohingya yang dianggap sebagai ancaman. Sikap ini diperkuat oleh pandangan diskriminatif terhadap Rohingya, yang sering digambarkan sebagai "musuh" yang perlu dihancurkan, sehingga mereka merasa bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang dibenarkan. Selain sikap, norma sosial juga memainkan peran penting dalam pembentukan niat pelaku. Di Myanmar, norma sosial yang ada mungkin memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap Rohingya dapat diterima atau bahkan didukung oleh masyarakat atau struktur kekuasaan yang lebih besar. Ketika pelaku merasa bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap Rohingya tidak akan dihukum atau dianggap sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, mereka lebih cenderung untuk melanjutkan perilaku tersebut. Selain itu, kontrol perilaku juga berperan penting dalam teori ini. Pelaku yang merasa mereka memiliki kontrol penuh terhadap tindakan tersebut, terutama karena impunitas atau lemahnya penegakan hukum internasional, akan lebih cenderung untuk bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum. Perasaan bebas dari hukuman ini membuat kekerasan seksual menjadi pilihan yang lebih "rasional" dalam konteks kekuasaan dan impunitas.

Kesimpulan

Kekerasan seksual terhadap Rohingya merupakan kejahatan internasional yang digunakan sebagai alat politik untuk menekan dan menghancurkan komunitas mereka. Analisis melalui teori *rational choice* menunjukkan bahwa pelaku menganggap tindakan ini sebagai strategi rasional untuk mencapai dominasi etnis, didukung oleh impunitas yang menghilangkan rasa takut terhadap konsekuensi hukum. Sementara itu, teori *reasoned action* menjelaskan bahwa sikap positif pelaku terhadap kekerasan seksual, didukung oleh norma sosial diskriminatif, memperkuat niat mereka untuk bertindak. Kekerasan ini tidak hanya menyerang fisik korban, tetapi juga bertujuan menghapus identitas dan eksistensi Rohingya. Komunitas internasional perlu segera bertindak untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan.